

Judul : Arwani Thomafi Wakil Ketua Komisi V DPR, Jangan Menabrak Logika Publik
Tanggal : Rabu, 03 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

ARWANI THOMAFI, Wakil Ketua Komisi V DPR Jangan Menabrak Logika Publik

Kemenhub melakukan penyesuaian Surat Edaran (SE) tentang perjalanan dalam negeri. Termasuk, perjalanan darat. Pandangan Anda?

Kementerian Perhubungan patut diapresiasi. Tetapi, Pemerintah harus mengambil pelajaran dari hiruk pikuk ini. Perumusan sebuah aturan harus berbasis data. Jangan sampai kebijakan publik justru menabrak logika umum publik.

Logika umumnya bagaimana?

Kasus Covid-19 semakin menurun, dan penyebaran vaksin semakin masif. Tetapi, syarat perjalanan malah dibuat rumit. Belum lagi soal kemampuan masyarakat terkait biaya tes.

Apa saran Anda?

Poinnya, Pemerintah harus lebih hati-hati dalam menerbitkan kebijakan. Semangat menekan penyebaran Covid-19 *yes*, tapi jangan sampai menabrak logika publik. Ini tidak baik, apalagi dalam situasi ekonomi yang belum pulih. Logika publik ini akan mudah disandingkan dengan kebijakan Pemerintah.

Sebaiknya bagaimana?

Salah satu ciri kebijakan publik yang baik, mencerminkan kondisi sosiologis masyarakat. Ini yang absen dalam beberapa aturan yang tempo hari membuat publik gaduh. Kita sudah nyaris dua tahun mengalami pandemi. Dari sisi edukasi, publik jauh lebih peduli. Meski fakta yang lain, tidak bisa kita tutupi, bahwa protokol kesehatan belakangan ini tampak kendur.

Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan?

Yang mesti dilakukan adalah percepatan vaksinasi, maksimal instrumen tracing, salah satunya melalui aplikasi PeduliLindungi, dan aktivasi program pengendalian Covid-19 dengan baik. Budaya peduli Covid-19, mestinya dibentuk. Bukan melalui kebijakan "potong kompas" dengan membuat kebijakan yang instan. Yakni, kewajiban *men-gan-tong-i* hasil tes bebas Covid-19. Ingat, esensi tes itu untuk tracing (penelusuran) bukan sebagai instrumen administrasi perjalanan.

Apakah aturan semacam ini perlu dicabut?

Semangat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, perlu kita dukung dan dorong karena memang faktanya Covid-19 masih ada. Tapi, bukan dengan cara potong kompas.

Yang bukan potong kompas itu bagaimana?

Konsistensi kebijakan, aktivasi program pencegahan, perkuat tracing,

perketat masuknya orang dari negara-negara yang teridentifikasi muncul varian baru.

Apakah syarat tes semacam ini urgent?

Jika program-program itu konsisten dijalankan, rasanya tidak perlu kebijakan tes. Bilapun harus ada, ditujukan sebagai upaya preventif, gratiskan syarat administratif perjalanan itu dan cukup antigen. ■ REN

